

## BUPATI BIREUEN PROVINSI ACEH

# KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 245 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

### PENUNJUKAN PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

#### BUPATI BIREUEN,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU :

Menunjuk Saudara

Nama

: Ir. IBRAHIM, M.Si

NIP

: 19641223 199403 1 004

Pangkat

: Pembina Utama Madya

Jabatan

: Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen

sebagai Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten

Bireuen Tahun 2023.

**KEDUA** 

Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;

c. mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;

d. mengatur pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan BMD;

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRK;

f. melakukan koordinasi inventarisasi dan penatausahaan BMD; dan

g. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Barang Milik

Daerah bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

**KEEMPAT** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen pada tanggal 24 Februari 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 春

X AULIA SOFYAN